



Modal Sosial dalam Graduasi Sejahtera Mandiri Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali

Ni Luh Putu Manasaputri Indrasawarni¹
Gede Sri Darma²

Received 26 January 2023

Revised 21 March 2023

Accepted 12 May 2023

Abstrak

Graduasi sejahtera mandiri merupakan fenomena keluarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara sukarela baik atas inisiatif pribadi maupun dorongan dari pendamping. Menariknya, di saat terjadi kenaikan angka kemiskinan dan mayoritas KPM ingin tetap mempertahankan status kepesertaan PKH, masih terdapat KPM yang mampu mencapai graduasi sejahtera mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong KPM dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri ditinjau dari aspek modal sosial, serta menggali kendala-kendala dalam pencapaiannya, sehingga dapat dirumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri PKH. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi yaitu Desa Candikuning dan Sumerta Kaja dengan metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Administrator Pangkalan Data PKH, Kepala Kewilayahan, Pendamping, dan KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berkontribusi dalam mewujudkan graduasi sejahtera mandiri PKH. Namun masih ditemukan kendala-kendala baik dari internal KPM maupun kendala eksternal seperti belum stabilnya perekonomian pasca pandemi, serta belum optimalnya program-program pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka disusun strategi kebijakan menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan alternatif strategi antara lain: penguatan pendamping PKH, melaksanakan program pemberdayaan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sinergi dengan stakeholders terkait untuk melaksanakan pelatihan kewirausahaan, mempermudah akses permodalan, serta melanjutkan program komplementer untuk mendukung stabilitas ekonomi KPM pasca pandemi.

Kata Kunci: Modal Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan, SWOT

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional. Email: manasaputri37@gmail.com

² Pascasarjana, Universitas Pendidikan Nasional. Email: sridarma@undiknas.ac.id



Abstract

Independent Prosperous Graduation is a phenomenon where Beneficiary Families (KPM) left voluntarily from the Family Hope Program (PKH) either on personal initiative or because of the encouragement from companions. Interestingly, at the time when there was an increase in the poverty rate and the majority of KPM wanted to maintain PKH membership status, there were still KPM who were able to achieve independent prosperous graduations. This study aims to analyze the driving factors for KPM in achieving independent prosperous graduations in terms of the social capital aspect, as well as to explore the obstacles in achieving them, so that a policy strategy can be formulated to increase the number of PKH independent prosperous graduation. The research was conducted in two locations, Candi Kuning and Sumerta Kaja Villages using descriptive qualitative method. The informants in this study were the Head of the Bali Province P3A Social Service, Administrator of the PKH Database, Regional Head, Companion, and PKH KPM. The result of the study showed that social capital contributes in realizing PKH's independent prosperous graduation. However, internal KPM and external constraints were still found, such as post-pandemic economic instability and empowerment programs were not optimal yet. Based on those constraints, a policy strategy was developed using SWOT analysis which produced alternative strategies, such as: strengthening PKH assistants, implementing more systematic and sustainable empowerment programs, synergizing with relevant stakeholders to carry out entrepreneurship training, facilitating easy access to capital, and continuing complementary programs to support post-pandemic KPM economic stability.

Keywords: *Social Capital; Poverty Alleviation; Family Hope Program; SWOT*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena yang dihadapi dunia internasional, tidak hanya pada negara miskin dan berkembang (Tantoro 2014). Penanggulangan kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 penetapan tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG's) yang ditargetkan hingga periode 2030 dengan sasaran "End poverty in all its form everywhere" (Liu dkk. 2020). Indonesia menjadi salah satu dari 160 negara di dunia yang telah menandatangani dan berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan yang ditargetkan hingga tahun 2030 (Nursini 2020). Maka dari itu dibutuhkan strategi yang tepat guna mencapai tujuan tersebut.

Tolok ukur tingkat kemiskinan di Indonesia dilihat berdasarkan persentase angka kemiskinan yang dipublikasikan dalam berita resmi Badan Pusat Statistik. Menurut berita resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada September



2021, angka kemiskinan Provinsi Bali mencapai angka 4,72% atau sejumlah 211.460 jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode Maret 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2022). Peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Bali salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada lumpuhnya sektor pariwisata, di mana pertumbuhan ekonomi Bali selama ini sangat ditopang oleh sektor pariwisata.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilaksanakan dengan mengambil dua fokus utama yakni membantu mengurangi beban hidup serta upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pengurangan beban hidup bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin yang dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dan sebagainya. Sedangkan upaya peningkatan pendapatan dilaksanakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Melalui program pemberdayaan, masyarakat miskin diharapkan dapat mengembangkan potensi serta sumber daya yang dimiliki dengan didukung oleh stimulus dari pemerintah (Poluakan, Raharjo, dan Nurwati 2020).

Pembangunan nasional pada hakikatnya dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada implementasinya, pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah masih dirasa kurang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Peran negara dalam bentuk penyaluran modal ekonomi saja dirasa tidak cukup untuk menyukseskan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Di samping penyaluran modal ekonomi dalam bentuk bantuan tunai, diperlukan peran masyarakat dan lingkungannya dalam bentuk modal sosial. Modal sosial merupakan sumberdaya yang melekat dalam hubungan masyarakat, merujuk pada norma-norma, jejaring, dan kepercayaan untuk membangun kerjasama guna mencapai suatu tujuan (Usman 2018) (Haridison 2021) (Budiarta dkk. 2021).

Konsep modal sosial telah berkembang dan digunakan sebagai sebuah kerangka teoritis oleh para akademisi dan praktisi di dalam isu pembangunan. Modal sosial merupakan salah satu bagian dari dimensi sosial dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yang mensinergikan tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan.

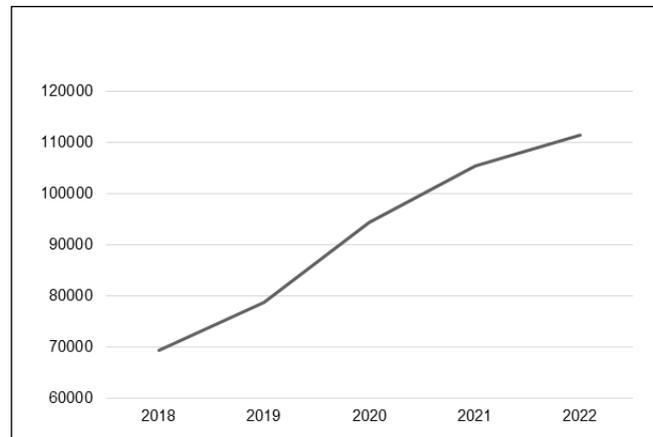


Modal sosial memiliki tiga unsur utama yaitu nilai/ norma, jaringan dan kepercayaan (Fathy 2019). Tiga unsur tersebut mampu mendorong partisipasi individu untuk bergerak secara bersama-sama demi mencapai tujuan bersama. Menurut penelitian Haridison (2021), kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan lebih mudah menyelesaikan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi. Dengan adanya kerja sama, rasa saling percaya, dan toleransi, mereka dapat membangun jaringan yang kuat, baik di dalam internal kelompoknya maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Khususnya pada kelompok masyarakat tradisional banyak dijumpai perkumpulan-perkumpulan informal yang cukup kuat dengan berpedoman pada nilai-nilai, norma, dan etika kolektif sebagai sebuah komunitas yang saling berhubungan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang menggabungkan antara modal ekonomi dan modal sosial pada hakikatnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2007 melalui Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, hingga ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan disebut bantuan tunai bersyarat karena penerima manfaat harus memenuhi persyaratan tertentu serta memiliki kewajiban tertentu sebagai bentuk komitmen terhadap program. Syarat komponen penerima manfaat PKH yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, terdiri dari antara lain: komponen kesehatan (ibu hamil/menyusui dan balita), komponen pendidikan (anak wajib belajar 12 tahun), dan komponen kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas dan lanjut usia) (Kementerian Sosial RI 2018).

Seiring naiknya angka kemiskinan, yang juga merupakan dampak dari pandemi Covid-19, bantuan PKH yang telah disalurkan di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti data yang tersaji pada grafik berikut:

Gambar 1. Jumlah penerima PKH di Provinsi Bali Tahun 2018 s.d 2022



Sumber: Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, 2022

Data pada grafik di atas menunjukkan terjadi peningkatan jumlah KPM PKH di Provinsi Bali selama kurun waktu lima tahun. Peningkatan angka tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk miskin yang masuk dalam basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diiringi dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN merupakan salah satu kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan dalam rangka memulihkan kondisi perekonomian nasional untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 maupun dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional (Pemerintah RI 2020). Salah satu intervensi kebijakan dalam Program PEN yang bertujuan untuk melindungi konsumsi masyarakat khususnya di kalangan miskin dan rentan adalah perluasan penerima manfaat PKH (Kementerian Keuangan RI 2021).

Arah kebijakan PKH tidak hanya sebatas memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran atau memastikan KPM mampu menggunakan layanan non tunai, namun hal yang utama adalah bagaimana PKH dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM graduasi yang berdaya (Yanti dan Adi 2021). Indikator keberhasilan PKH adalah meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan KPM, yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan graduasi. Dalam Petunjuk Teknis Graduasi PKH dijelaskan bahwa graduasi adalah kondisi di mana tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/ atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi KPM, yang dibuktikan



melalui kegiatan pemutakhiran data. Graduasi dibagi menjadi dua jenis yakni graduasi alamiah yang terjadi ketika KPM PKH sudah tidak memiliki syarat komponen kepesertaan, dan graduasi sejahtera mandiri yang terjadi ketika kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat baik dari inisiatif KPM sendiri maupun dorongan dari pendamping sosial (Kementerian Sosial RI 2020). Di balik meningkatnya jumlah KPM PKH di Provinsi Bali selama masa pandemi, masih terdapat KPM yang mampu mencapai graduasi sejahtera mandiri. Berikut adalah data graduasi sejahtera mandiri di Provinsi Bali:

Tabel 1. Data Graduasi Sejahtera Mandiri PKH Provinsi Bali Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KPM per-Desember 2021	Jumlah Graduasi	Persentase Graduasi
1	Buleleng	29.922	116	0,39
2	Karangasem	18.959	21	0,11
3	Tabanan	13.368	94	0,70
4	Klungkung	5.744	31	0,54
5	Bangli	8.775	17	0,19
6	Gianyar	12.018	16	0,13
7	Jembrana	9.034	34	0,38
8	Denpasar	1.869	72	3,85
9	Badung	13.368	40	0,69
Total		105.452	441	0,42

Sumber : Dinas Sosial P3A Provinsi Bali

Berdasarkan data di atas, Kota Denpasar memiliki jumlah KPM graduasi sejahtera mandiri terbanyak di Provinsi Bali, disusul oleh Kabupaten Tabanan dan Badung. Provinsi Bali merupakan daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata. Pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan runtuhnya sektor pariwisata berdampak besar pada angka kemiskinan di Bali. Banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian tentunya berdampak pula pada penurunan konsumsi masyarakat dan sektor perekonomian



lainnya. Kondisi tersebut menjadi daya tarik penelitian bahwa bagaimana sebuah daerah yang cukup terdampak pandemi, masih mampu menghasilkan KPM graduasi.

Graduasi sejahtera mandiri telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan status ekonomi, kualitas kesehatan, dan pendidikan keluarga penerima manfaat (Oktavia Sari, Sulistyowati, dan Prihantika 2020). Sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan PKH, graduasi sejahtera mandiri menjadi topik penelitian yang menarik di tengah naiknya angka kemiskinan, kebijakan perluasan kepesertaan PKH, serta banyaknya KPM yang justru ingin mempertahankan status kepesertaan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam faktor-faktor pendorong graduasi sejahtera mandiri PKH dari perspektif modal sosial, kendala pencapaian, serta strategi kebijakan yang berpotensi meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2022. Fokus penelitian adalah fenomena graduasi sejahtera mandiri PKH di Provinsi Bali berdasarkan data KPM graduasi tahun 2021. Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan keterwakilan dari pihak Pemerintah, pendamping sosial, dan masyarakat, antara lain Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali, Administrator Pangkalan Data pada Sekretariat PKH Provinsi Bali, Pendamping PKH, Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun), serta KPM PKH yang sudah mencapai graduasi sejahtera mandiri maupun yang masih aktif sebagai peserta. Informan kunci merupakan KPM dan pendamping PKH yang terlibat secara langsung dalam pencapaian graduasi sejahtera mandiri.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin dilaksanakan melalui pendekatan wilayah antara lain perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, dan perbatasan negara. Untuk Provinsi Bali, penanganan fakir miskin dilaksanakan di dua wilayah yakni perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi dengan



mengambil sampel daerah perdesaaan dan perkotaan. Penentuan Kabupaten dan Kota ditetapkan berdasarkan Kabupaten dan Kota yang memiliki persentase KPM graduasi sejahtera mandiri terbanyak, yakni Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar. Pemilihan lokasi desa ditetapkan berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Koordinator Pendamping PKH Kabupaten/Kota yang dinilai paling memahami lokasi dan objek penelitian. Dari hasil koordinasi tersebut maka ditentukan lokasi penelitian untuk wilayah perdesaaan adalah di Desa Candikuning yang terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Sedangkan lokasi untuk wilayah perkotaan adalah Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan pertimbangan lokasi tersebut memiliki KPM PKH graduasi sejahtera mandiri dalam kurun waktu dua tahun terakhir beserta pendampingnya yang masih aktif bertugas.

Selanjutnya, proses analisis data dilaksanakan melalui teknik *coding* yang memuat *coding* indikator dan informan. Hasil wawancara diklasifikasikan sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian antara lain: modal sosial (nilai/norma, kepercayaan, jaringan), serta kendala-kendala dalam pencapaian graduasi sejahtera mandiri. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dianalisis lebih mendalam menggunakan strategi SWOT.

Kerangka Teori: Modal Sosial

Perkembangan teori modal sosial tidak terlepas dari gagasan yang disampaikan tokoh-tokoh pencetusnya yakni Pierre Bourdieu, James Coleman, Robert Putnam, dan Francis Fukuyama. Tokoh-tokoh tersebut memiliki penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan modal sosial. Menurut Bourdieu, modal sosial merupakan keseluruhan sumberdaya baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada rasa saling mengakui. Dengan keikutsertaan dalam suatu kelompok, seseorang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok bergantung pada kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi,



budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang tergabung dalam sebuah kelompok jaringan (Bourdieu 1986).

Setelah pemikiran yang dikemukakan Bourdieu, konsep modal sosial semakin berkembang dengan munculnya hasil-hasil penelitian dari James Coleman, Robert Putnam, dan Francis Fukuyama. Melalui hasil penelitian tiga tokoh besar tersebut, konsep modal sosial semakin banyak digunakan sebagai sebuah pendekatan teoritis untuk memahami dinamika suatu hubungan masyarakat maupun sebagai alat yang efektif untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara-negara berkembang.

Modal sosial merupakan sebuah sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi (Coleman 1999). Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang menjadi pondasi penting dalam modal sosial. Pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa percaya dalam lingkungan sosial. Unsur kedua adalah pentingnya arus informasi di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Pilar ketiga adalah norma-norma yang harus ditaati dalam masyarakat dengan sanksi yang jelas dan efektif. Pemikiran yang dikemukakan Coleman menjadi titik tolak bagi para peneliti lainnya untuk menjelaskan pentingnya peranan modal sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya, Robert Putnam mengemukakan bahwa modal sosial mengacu pada ciri-ciri organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama (Putnam 1993). Berdasarkan hasil penelitiannya, Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi.

Francis Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama dalam suatu kelompok dan memungkinkan terbentuknya kerjasama antar anggota kelompok tersebut (Fukuyama 2002). Fukuyama menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam modal sosial. Pertama, nilai dan norma yang menjadi dasar dalam terbentuknya kepercayaan. Kedua, kepercayaan yang digunakan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ketiga, jaringan yang



berfungsi membentuk kepercayaan melalui interaksi sosial dan pertukaran informasi antara anggota masyarakat. Fukuyama menekankan pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan penelitiannya, kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antar sesama warga. Modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama mengemukakan bahwa kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya. Tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan (Fukuyama 1995). Tiga unsur penting dalam modal sosial yang dikemukakan Fukuyama menjadi populer dan banyak digunakan dalam membedah studi kasus.

Lebih lanjut, modal sosial merupakan sumber daya yang terdapat dalam hubungan antar aktor yang baru dapat diidentifikasi setelah aktor-aktor tersebut saling menjalin relasi (Usman 2018). Modal sosial adalah modal yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat untuk berhimpun dan bekerjasama dalam menciptakan jaringan berdasarkan kepercayaan dan disokong oleh norma dan nilai sosial untuk mencapai suatu tujuan (Budiarta dkk. 2021). Terdapat beberapa unsur dalam modal sosial, yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma serta upaya menggerakkan, dalam struktur hubungan sosial guna mencapai tujuan individu maupun kelompok secara efektif dan efisien (Damsar dan Indrayani 2019) (Fathy 2019).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan keseluruhan sumber daya dalam masyarakat yang mengandung unsur-unsur kepercayaan, nilai/norma, serta jaringan yang memungkinkan terjalannya kerjasama guna mencapai tujuan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Putnam dan Fukuyama bahwa unsur dalam modal sosial dapat menjadi prakondisi bagi perkembangan ekonomi dan mencapai kesejahteraan, maka modal sosial dinilai dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Unsur-unsur dalam modal sosial yang digunakan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, nilai dan norma. Nilai dapat menuntun seseorang untuk mengidentifikasi baik atau tidaknya sebuah perilaku, sehingga bisa menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan



bermasyarakat (Frimayanti 2017). Dalam masyarakat pada umumnya terdapat nilai universal yang didukung oleh banyak orang seperti keindahan, kejujuran, keadilan, kedamaian, dan kemurahan hati. Terdapat berbagai macam nilai yang berkembang di masyarakat antara lain: nilai pribadi, nilai moral, nilai estetika, nilai materiil, dan nilai spiritual (Damsar dan Indrayani 2019).

Nilai dan norma telah menjadi standar yang menentukan perilaku individu. Namun berbeda dengan nilai, norma memiliki konsekuensi yang lebih jelas apabila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Norma merupakan aturan main yang disepakati bersama dan menuntun perilaku seseorang (Damsar dan Indrayani 2019). Bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma dapat berbentuk tindakan (hukuman) dan dapat berupa sanksi sosial. Sanksi sosial ini pada umumnya ditunjukkan dalam bentuk sikap, seperti penolakan atau tidak dilibatkannya seseorang yang melanggar norma dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kepatuhan terhadap norma diyakini mampu menciptakan relasi-relasi sosial, melembagakan kesadaran kolektif serta persamaan dalam bersikap dan bertindak yang dapat menjadi energi untuk mengembangkan modal sosial (Usman 2018). Seseorang yang patuh terhadap norma akan mendapatkan timbal balik positif seperti pujian dan penerimaan dalam kelompok, sedangkan bagi yang tidak patuh akan diberikan sanksi seperti dikucilkan, digosipkan, hingga mendapat ancaman lainnya (Cislaghi dan Heise 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, nilai-nilai dalam hal ini nilai sosial (rasa malu dengan label keluarga miskin) dan nilai agama (kejujuran dan menolong sesama yang lebih membutuhkan) menjadi faktor pendorong terbentuknya rasionalitas KPM PKH untuk melakukan graduasi sejahtera mandiri (Riztiana dan Handoyo 2021). Penelitian lainnya menyatakan bahwa graduasi sejahtera mandiri bisa terwujud dari adanya kontrol sosial dari sesama KPM maupun masyarakat di lingkungannya melalui penerapan sanksi kepada KPM yang dinilai telah mampu mandiri namun tidak bersedia mengajukan graduasi sejahtera mandiri (Khoiriyah dan Kunarti 2019).

Unsur modal sosial yang kedua yakni kepercayaan. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam suatu jaringan, bahwa mereka tidak akan saling menyakiti dan mengingkari. Sebaliknya, mereka selalu berusaha untuk



memelihara kesadaran, perilaku dan tindakan kolektif guna mencapai tujuan bersama (Usman 2018). Kepercayaan merupakan bagian dari modal sosial yang bersifat kognitif, berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh individu. Kepercayaan diyakini sebagai komponen inti dari modal sosial yang sering digunakan sebagai indikator terbaik dalam mengukur modal sosial (Fahmi dkk. 2019). Menurut Lawang, kepercayaan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih dengan harapan akan menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial (Damsar dan Indrayani 2019).

Kepercayaan dapat membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan. Fukuyama menggambarkan hubungan trust dengan perkembangan ekonomi di negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dan rendah. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa rendahnya kepercayaan dapat menghambat laju perkembangan ekonomi di Cina. Sebaliknya, dengan kepercayaan yang tinggi, Jepang berhasil menjadi negara maju dengan mengembangkan bisnis dan perekonomian negara (Fukuyama 2002). Menurut hasil penelitian terkait peran modal sosial yang dilakukan kepada rumah tangga miskin di Indonesia, dikemukakan bahwa jalinan kepercayaan antara rumah tangga miskin yang terbentuk telah berpotensi membawa mereka keluar dari garis kemiskinan (Yamin dan Dartanto 2016).

Unsur ketiga adalah jaringan. Jaringan sosial merupakan ikatan relasional antara aktor-aktor yang merupakan jalur mengalirnya sumberdaya. Ikatan yang kuat memberi dampak dan timbal balik yang lebih signifikan bagi anggota dalam jaringan. Jaringan yang memiliki ikatan semacam ini menunjukkan kemauan yang lebih tinggi untuk saling membantu, informasi mengalir lebih cepat, dan adanya rasa saling menghargai antar anggota dalam jaringan (Ma dan Kaplanidou 2021). Jejaring memfasilitasi berlakunya norma-norma yang telah menjadi kesepakatan bersama dan pemberian sanksi terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma tersebut. Dalam jejaring aktor-aktor senantiasa berusaha menjaga berlakunya norma-norma terutama untuk memelihara hubungan sosial yang harmonis. Jejaring sosial berperan sangat signifikan dalam mendorong penyebaran informasi yang perlu dipahami tentang berbagai masalah yang dihadapi serta mendiskusikan alternatif-alternatif yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut (Usman 2018).



Dalam jaringan sosial terjalin koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep jaringan pada penelitian ini bisa diamati pada jaringan yang terbentuk dalam kelompok KPM PKH yang dibimbing oleh seorang pendamping khususnya melalui kegiatan pertemuan kelompok. Selanjutnya, jaringan bisa diperluas melalui pemberdayaan pada KPM yang merintis suatu usaha di mana mereka bisa membentuk jaringan dengan para distributor dan pelanggan, di mana pada umumnya para Ibu penerima bantuan PKH yang melakukan graduasi telah memiliki usaha skala kecil yang mampu menopang kehidupan keluarga. Keterlibatan KPM dalam jaringan usaha yang dirintisnya dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan pencapaian graduasi sejahtera mandiri.

Modal sosial menjadi teori yang relevan digunakan dalam meneliti permasalahan penanggulangan kemiskinan. Konsep modal sosial tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga perihal perolehan akses terhadap sumber daya yang ditentukan pula oleh keberadaan jaringan dan rasa saling percaya dalam kelompok masyarakat. Eksistensi modal sosial dapat memudahkan rumah tangga miskin dalam mengakses modal-modal lainnya seperti: modal sumber daya manusia, modal finansial, dan modal fisik melalui perluasan jejaring sosial dan rasa saling percaya (Kharisma dkk. 2020). Di samping itu, melihat karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Pulau Bali yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, budaya, serta kecenderungan masyarakat hidup dalam suatu kelompok/ jaringan kemasyarakatan di lingkungannya, maka konsep modal sosial dipandang sangat relevan untuk diaplikasikan pada penelitian ini.

Analisis SWOT

Teori analisis SWOT merupakan sebuah teori yang bisa digunakan untuk merumuskan rencana atau program kerja (Atmoko 2014). Analisis SWOT mengacu pada penilaian dan evaluasi dari beberapa komponen antara lain *strengths* (S), *weakness* (W), *opportunities* (O), dan *threats* (T) yang secara komprehensif dan sistematis membantu dalam merumuskan strategi, rencana, dan tindakan pencegahan yang sesuai berdasarkan pada hasil penilaian (Wang dan Wang 2020). Metode analisis SWOT diawali dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal objek yang akan dianalisis. Dalam analisis



SWOT, kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) dikategorikan sebagai parameter internal, sedangkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dikategorikan sebagai parameter eksternal (Namini, Loda, dan Meshkini 2021).

Pendekatan dalam analisis SWOT dapat dilaksanakan melalui metode kualitatif maupun kuantitatif (Suriono 2021). Pendekatan secara kualitatif dilaksanakan melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang bersumber dari wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Setelah data dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal, kemudian data disajikan secara sistematis dalam bentuk matriks SWOT. Selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang tertuang dalam strategi SO (*strength-opportunity strategy*), strategi WO (*weakness-opportunity strategy*), strategi ST (*strength-threats strategy*), dan strategi WT (*weakness-threats strategy*).

Penelitian ini tidak sebatas menjawab pertanyaan mengenai faktor pendorong KPM PKH dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri. Namun hal yang tidak kalah pentingnya adalah merumuskan strategi kedepan untuk meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri PKH. Oleh sebab itu, penulis menggunakan teknik analisis SWOT dalam merumuskan strategi berdasarkan analisis terhadap kondisi eksternal dan internal yang ditemukan pada proses pengumpulan data.

Temuan dan Analisis

Gambaran Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Provinsi Bali

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada tahun 2007 Pemerintah mencetuskan Program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH. Teknis penanggulangan kemiskinan di Indonesia kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa pendataan fakir miskin dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi berbasis teknologi informasi yang dijadikan sebagai data terpadu. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka penetapan penerima manfaat PKH dilaksanakan berdasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola secara terpusat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Data tersebut merupakan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan



Pusat Statistik pada tahun 2011 yang diperbaharui secara berkala sampai dengan tahun 2015. Namun pada tahun 2017 hingga saat ini, pengelolaan data diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial RI yang kemudian dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada periode awal implementasi PKH, program ini belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Di Provinsi Bali, PKH pertama kali diimplementasikan pada tahun 2010 dan baru mencakup dua kabupaten yakni Buleleng dan Karangasem. Dipilihnya dua kabupaten tersebut sebagai pilot project pelaksanaan PKH di Provinsi Bali dengan pertimbangan memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Seiring dengan pelaksanaannya yang dianggap telah memberi dampak baik bagi perekonomian masyarakat kurang mampu, maka wilayah cakupan PKH di Provinsi Bali diperluas hingga tahun 2015 telah mencakup keseluruhan kabupaten/kota. Penyaluran bantuan PKH pada tahun 2022 telah dilaksanakan hingga periode pencairan tahap III dengan rincian jumlah penerima manfaat sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Pencairan Bantuan PKH di Provinsi Bali Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Tahun 2022		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Badung	6.958	6.832	6.752
2	Bangli	10.071	9.408	9.354
3	Buleleng	29.791	29.050	29.111
4	Gianyar	12.449	12.040	11.962
5	Jembrana	9.748	9.374	9.326
6	Karangasem	19.584	19.491	19.771
7	Klungkung	7.073	6.802	6.708
8	Kota Denpasar	2.836	2.499	3.099
9	Tabanan	12.925	12.458	12.067
Total		111.435	107.954	108.150

Sumber : Dinas Sosial P3A Provinsi Bali

Bantuan sosial PKH yang disalurkan di Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial RI terdiri dari komponen antara lain:



Tabel 3. Komponen Bantuan Sosial PKH

No	Jenis Komponen	Nominal
1	Ibu Hamil /Nifas	3.000.000/tahun
2	Anak Usia Dini	3.000.000/tahun
3	Anak Usia SD/Sederajat	900.000/tahun
4	Anak Usia SMP/Sederajat	1.500.000/tahun
5	Anak Usia SMA/Sederajat	2.000.000/tahun
6	Lanjut Usia	2.400.000/tahun
7	Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000/tahun

Sumber : Kementerian Sosial RI

Jenis komponen bantuan PKH tersebut di atas dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Untuk waktu penyalurannya dalam satu tahun dilaksanakan secara bertahap, selama empat kali yakni tahap pertama pada bulan Januari s.d Maret, tahap kedua pada bulan April s.d Juni, tahap ketiga pada bulan Juli s.d September, dan tahap keempat pada bulan Oktober s.d Desember. Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan secara non tunai bekerjasama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sesuai dengan besaran komponen dalam keluarga. Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyaluran bantuan PKH di Provinsi Bali secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa penerima manfaat yang menyatakan bahwa dirinya tidak selalu menerima bantuan penuh selama satu tahun. Menurut informasi dari pendamping sosial PKH, hal tersebut disebabkan karena daftar penerima bantuan setiap saat bisa mengalami perubahan otomatis berdasarkan sistem pendataan dalam DTKS.

Keberhasilan pelaksanaan PKH tidak terlepas dari peran pendamping sosial. Pendamping PKH merupakan tenaga yang direkrut oleh Kementerian Sosial RI yang memiliki tugas antara lain: memastikan bantuan diterima oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran; melaksanakan pertemuan kelompok bersama KPM minimal satu kali setiap bulan; dan memfasilitasi KPM dalam mengakses program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Jumlah penerima manfaat PKH yang didampingi oleh seorang pendamping dibagi per desa dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penerima manfaat. Berikut adalah jumlah pendamping PKH di Provinsi Bali berdasarkan kabupaten:



Tabel 4. Jumlah Pendamping PKH Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Pendamping
1	Buleleng	81
2	Karangasem	38
3	Tabanan	32
4	Klungkung	18
5	Bangli	23
6	Gianyar	35
7	Jembrana	22
8	Denpasar	14
9	Badung	17
Total		280

Sumber : Dinas Sosial P3A Provinsi Bali

Pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting mulai dari proses verifikasi, validasi, sosialisasi, pencairan bantuan, pertemuan kelompok, pemutakhiran data, serta menindaklanjuti kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Di samping itu, pendamping juga sangat berperan dalam pencapaian graduasi sejahtera mandiri PKH. Pertemuan kelompok pada kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau juga dikenal dengan istilah *Family Development Session* (FDS) menjadi salah satu sarana menyebarkan informasi dan edukasi dengan berbagai pendekatan yang dapat membentuk pola pikir KPM untuk lebih maju.

Teknis Pelaksanaan Graduasi Sejahtera Mandiri di Desa Candikuning dan Sumerta Kaja

Petunjuk teknis graduasi PKH diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 03/3/BS.02.01/10/2020. Dalam dokumen tersebut dipaparkan latar belakang pelaksanaan graduasi PKH berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI pada tahun 2014, terdapat 60 persen KPM PKH angkatan pertama (tahun 2007) yang belum berhasil “lulus” dari PKH.



Oleh sebab itu pada PKH generasi keempat (tahun 2019), Pemerintah mencanangkan graduasi atau masa berakhirnya kepesertaan PKH yang menjadi tujuan arah kebijakan PKH. Sesuai petunjuk teknis, graduasi PKH dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut (Kementerian Sosial RI 2020):

1. Graduasi alamiah, yakni berakhirnya kepesertaan PKH disebabkan oleh tidak terpenuhinya lagi syarat komponen kepesertaan.
2. Graduasi Sejahtera Mandiri, yakni berakhirnya kepesertaan PKH karena kondisi sosial ekonomi yang telah mengalami peningkatan, sehingga KPM dikategorikan mampu dan sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi Sejahtera Mandiri dapat diajukan baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya.

Graduasi sejahtera mandiri menjadi standar kinerja Sumber Daya Manusia pelaksana PKH, yang terdiri dari Koordinator Wilayah serta para pendamping di setiap desa. Kinerja SDM PKH tidak hanya sekedar membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial dan memastikan bantuan tepat sasaran. Namun utamanya adalah bagaimana SDM PKH dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang graduasi. Graduasi dalam hal ini tidak hanya secara alamiah karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun bagaimana menciptakan KPM graduasi yang mandiri dan berdaya. Dengan meningkatnya kemandirian dan taraf hidup, maka diharapkan KPM mampu mencapai graduasi sejahtera mandiri.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Desa Candikuning dan Desa Sumerta Kaja, alur teknis graduasi sejahtera mandiri dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data yang dilaksanakan setiap waktu oleh pendamping, khususnya ketika terdapat perubahan pada komponen kepesertaan KPM sebagai dasar mengetahui KPM masih memiliki kriteria komponen sesuai ketentuan.
2. Bidik graduasi yang dilaksanakan oleh pendamping dengan memilah KPM yang masa kepesertaannya telah mencapai lima tahun atau lebih, serta KPM yang diduga sudah lebih sejahtera dengan acuan melihat kemampuan daya beli KPM dan usaha yang dimiliki KPM. Senada dengan yang disampaikan Kepala Dusun Batusea, Desa Candikuning bahwa KPM bidik graduasi pada umumnya yang telah



memiliki kendaraan bermotor roda empat dan memiliki usaha, khususnya di Desa Candikuning di mana KPM rata-rata bermata pencaharian sebagai petani sayur, hingga memiliki usaha pengepul sayuran.

3. Sosialisasi graduasi yang dilaksanakan pada pertemuan kelompok maupun pendekatan melalui home visit. Hal ini disampaikan oleh KPM pada kesempatan wawancara, di mana KPM menyatakan bahwa para pendamping telah melakukan sosialisasi perihal graduasi pada pertemuan kelompok.
4. Pengajuan graduasi yang ditetapkan melalui surat pernyataan dari KPM yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah mampu dan secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan PKH, serta rujukan ke program sosial lainnya. Dalam proses pengajuan graduasi sejahtera mandiri, temuan di lapangan antara Desa Candikuning memiliki perbedaan dengan Desa Sumerta Kaja, di mana KPM graduasi di Desa Candikuning cenderung mengajukan diri untuk melakukan graduasi setelah dilakukan pendekatan oleh pendamping. Sedangkan di Desa Sumerta Kaja, KPM siap mengundurkan diri setelah sebelumnya diajukan terlebih dahulu oleh pendamping. Hal tersebut terjadi karena adanya stigma “sombong” atau “sudah kaya” yang berkembang di masyarakat ketika KPM mengajukan graduasi secara mandiri.

Alur teknis graduasi yang dijelaskan di atas sudah sesuai dengan petunjuk teknis graduasi yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor 03/3/BS.02.01/10/2020. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping PKH di Desa Candikuning dan Desa Sumerta Kaja sudah memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Kontribusi Modal Sosial Dalam Graduasi Sejahtera Mandiri PKH

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan, ditemukan bahwa unsur-unsur modal sosial meliputi nilai/ norma, kepercayaan, dan jaringan berkontribusi dalam mendorong KPM PKH untuk mencapai graduasi sejahtera mandiri. Berikut adalah analisis kontribusi modal sosial dalam graduasi sejahtera mandiri berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Nilai dan Norma

Nilai sosial merupakan suatu perbuatan yang dianggap baik maupun buruk dalam suatu kelompok masyarakat (Riztiana dan Handoyo 2021). Nilai yang diyakini bersama ini berperan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh para KPM PKH. Namun nilai yang diyakini oleh masyarakat suatu daerah, bisa mengalami perbedaan dengan daerah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh nilai-nilai terkait kesepakatan mengenai perbuatan yang dianggap baik sesuai ajaran agama adalah adanya rasa kemanusiaan dan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Nilai ini ditemukan baik pada KPM di Desa Candikuning maupun Sumerta Kaja. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh para KPM di Desa Sumerta Kaja adalah bahwa faktanya mereka masih banyak menjumpai masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Mereka memiliki kesadaran diri bahwa bantuan yang didapatkan dirasa sudah cukup, mengingat perekonomian keluarga sudah semakin membaik. Di samping itu, mereka memiliki keyakinan bahwa dengan keluar dari kepesertaan PKH akan membuka peluang bagi masyarakat kurang mampu lainnya agar berkesempatan untuk memperoleh bantuan PKH. Berkenaan dengan nilai keagamaan, Pendamping PKH Desa Candikuning telah berhasil melakukan pendekatan melalui konsep yang diyakini umat Hindu bahwa kebaikan umat akan dicatat oleh Bhatara Yama di mana jika saatnya tiba, buah dari kebaikan umat akan berujung pada surga. Kebaikan yang dimaksud oleh pendamping adalah memberi kesempatan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan bantuan ketika KPM bersangkutan sudah merasa lebih mampu secara ekonomi.

Di samping itu, nilai moral berupa rasa malu juga mempengaruhi keputusan KPM di Desa Candikuning untuk mengajukan graduasi sejahtera mandiri. Rasa malu merupakan salah satu nilai moral yang dapat berperan dalam pembentukan identitas individu. (Sumartani dkk. 2016). Rasa malu muncul karena mereka merasa sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri sedangkan masih ada orang lain yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut informasi dari Kepala Kewilayahan dan Pendamping PKH, bahwa pernah ditemukan KPM yang berbohong ketika diketahui sudah mampu dengan indikator memiliki kendaraan roda empat.



Ketika diketahui melakukan kebohongan, muncullah rasa malu yang kemudian mendorong KPM untuk mengakui bahwa ia sudah mampu dan akhirnya bersedia mengajukan graduasi diri.

Hal yang menarik dalam temuan penelitian ini adalah ada perbedaan indikator rasa malu pada KPM di Desa Candikuning dan Desa Sumerta Kaja. Di Desa Candikuning para KPM cenderung memiliki rasa malu ketika diketahui sudah mampu. Rasa malu tersebut kemudian mendorong mereka untuk mengajukan graduasi sejahtera mandiri. Berbeda dengan KPM di Desa Sumerta Kaja yang justru malu ketika mengajukan graduasi secara mandiri sebelum didorong oleh pendamping. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pendamping PKH Desa Sumerta Kaja, rasa malu tersebut muncul karena stigma 'sombong' dan 'sudah kaya' yang muncul dari rekan-rekannya ketika para KPM mengajukan graduasi secara mandiri. Namun hal tersebut tidak menjadi suatu penghalang karena peran pendamping yang sangat besar dalam mengedukasi dan memotivasi KPM agar bersedia mengajukan graduasi mandiri. Ketika motivasi dan dorongan untuk mengajukan graduasi datang dari pendamping, maka para KPM dengan sukarela bersedia mengajukan diri tanpa khawatir stigma dari masyarakat karena merasa sudah memperoleh dukungan oleh pendamping.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pendamping PKH Desa Candikuning, pendekatan norma hukum juga menjadi salah satu faktor pendorong graduasi sejahtera mandiri PKH, seperti yang disampaikan berikut ini:

"Jadi sebelumnya, saya waktu masuk di Candikuning ini koordinasi dulu dengan semua Kepala Wilayah. Kita undang Kepala Wilayahnya, kita duduk bareng. Jadi dalam koordinasi itu saya menyampaikan hak dan tanggung jawab peserta PKH, mengenai juga landasan hukumnya. Jadi dalam Peraturan Kementerian Sosial itu, kalau gak salah pasal 13, itu dinyatakan bahwa kalau ada masyarakat maupun Perangkat Daerah yang melakukan kebohongan verifikasi dan lain sebagainya itu didenda lima puluh juta dan kurungan penjara dua tahun. Nah pada saat saya turun ke lapangan, masuk ke rumah-rumah, saya menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan keagamaan. Jadi semua saya gunakan untuk membangun kesadaran mereka bahwa PKH tidak abadi dalam PKH ini ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah ketika dia sudah meningkat strata ekonominya maka melalui kesadaran pribadi dia harus memberikan kesempatan ini kepada yang lain. Saya sampaikan, 'ketika nanti Ibu ditemukan punya mobil, mungkin Ibu masih bisa sembunyi, banyak alasan untuk tidak mengakui, saya sampaikan, 'begini bu, sebelumnya saya minta maaf, kalau misalnya Ibu



berbohong itu tidak bisa Bu, sekarang konektivitas data itu sangat ketat sekali, Ibu bayar pajak itu bisa ketahuan.’ Nah ini pendekatan hukum saya gunakan juga, sehingga mereka mulai sadar dan berpikir. Akhirnya dia bilang ‘mohon maaf Pak Heri, saya berbohong, ini milik saya pribadi.’ Ini banyak kasus terjadi seperti ini. Jadi melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu penting sekali dalam menggraduasi.”

Norma memiliki konsekuensi atau sanksi ketika ada pelanggaran terhadap norma tersebut. Norma hukum biasanya berasal dari Undang-Undang yang ditetapkan oleh negara di mana jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi seperti kecaman, denda, hingga kurungan penjara (Elwijaya, Neviyarni, dan Irdamurni 2021). Pada saat sosialisasi, pendamping memberikan pemahaman mengenai landasan hukum pelaksanaan PKH serta hak dan kewajiban sebagai peserta PKH. Pendamping menjelaskan bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diatur mengenai sanksi jika terdapat masyarakat maupun Perangkat Daerah yang memalsukan verifikasi dan validasi data. Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan sanksi yakni denda sebesar lima puluh juta rupiah dan kurungan penjara dua tahun. Pendekatan melalui norma hukum tersebut juga telah berperan dalam mendorong KPM PKH untuk mengajukan graduasi sejahtera mandiri. Di samping timbulnya rasa malu ketika diketahui mampu secara ekonomi, KPM PKH juga mempertimbangkan sanksi hukum yang bisa dijatuhkan kepada mereka apabila terbukti melakukan kebohongan data.

2. Kepercayaan

Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong graduasi sejahtera mandiri PKH. Penerima manfaat PKH memiliki kepercayaan dan harapan bahwa program tersebut akan mampu mengubah jalan hidup mereka menjadi lebih baik. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang disampaikan Ibu NS (KPM PKH Desa Candikuning) berikut ini:

“Kalau dulunya jujur saja, saya (berpikir) gak mungkin kan, tapi setelah saya jalani, setelah saya dapat bantuan-bantuan, saya bisa nyekolahkan anak sampai kuliah saya bersyukur, sudah tamat, sudah wisuda gara-gara ini, dapat KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kalau gak dapat ini kan gak mungkin saya bisa kuliahin anak sampai wisuda dan sekarang sudah kerja. Motivasi dari Pak Kawil dan pendamping juga supaya bahwa anak harus masuk, karena kita orang tuanya sudah tidak berpendidikan, gimana agar anaknya bisa sekolah



setinggi-tingginya. Terharu, coba bayangkan masa seperti saya bisa sekolahkan anak. Saya gak nyangka bisa wisudain anak.”

Kepercayaan KPM terhadap keberhasilan Program Keluarga Harapan diawali oleh terbentuknya kepercayaan yang kuat antara KPM dengan pendampingnya. Proses sosialisasi, komunikasi, edukasi, serta kinerja yang baik dari pendamping sangat berperan dalam menciptakan kepercayaan para KPM. Melalui terciptanya rasa percaya, KPM cenderung mengikuti arahan yang disampaikan pendampingnya. Dukungan sosial dari pendamping menjadi salah satu faktor eksternal yang berhasil mendorong KPM keluar dari kepesertaan PKH. Dukungan tersebut berupa motivasi untuk memiliki usaha, serta informasi cara memulai dan mengembangkan usaha. Penerima manfaat yang sudah mencapai graduasi sejahtera mandiri adalah mereka yang pada umumnya telah memiliki usaha kecil. Mereka sangat yakin bantuan PKH berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut mereka, dengan adanya bantuan PKH, mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya. Melalui bantuan PKH maupun bantuan komplementaritas lainnya seperti bantuan sembako, mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Oleh sebab itu keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Pengalaman tersebut nyata disampaikan KPM di Desa Sumerta Kaja yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Mereka menyampaikan bahwa sejak menerima bantuan PKH, usaha mereka bisa semakin berkembang.

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Kewilayahan Dusun Batusesa, Desa Candikuning. Beliau memiliki kepercayaan bahwa PKH bisa membantu mengentaskan kemiskinan di Dusun Batusesa. Menurut beliau, KPM yang berhasil mencapai graduasi merupakan KPM yang memang pada awalnya masuk kategori tidak mampu, namun setelah dua atau tiga tahun masuk kepesertaan PKH, mereka menemukan peluang usaha. Peluang usaha maupun pengembangan usaha yang sudah dimiliki sebelumnya menurut Pendamping Desa Candikuning bisa terjadi karena fungsi keuangan yang dulunya tercerai berai untuk pendidikan anak, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa difokuskan untuk mengembangkan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, edukasi perihal manajemen keuangan keluarga merupakan materi rutin



yang disampaikan oleh pendamping saat pertemuan kelompok. Materi pendampingan yang diberikan dalam pertemuan kelompok disusun berdasarkan kurikulum khusus dari Kementerian Sosial RI. Materi-materi tersebut lebih cenderung mengarahkan KPM PKH pada visi mewujudkan keluarga berkualitas melalui kesadaran tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan yang dimiliki KPM terhadap pendampingnya, mempengaruhi perilaku mereka untuk senantiasa mengikuti informasi dan arahan yang diberikan oleh pendamping.

Faktor personal pendamping juga sangat mempengaruhi terciptanya rasa percaya dalam diri KPM. Seperti yang disampaikan oleh Ibu KS (KPM PKH Desa Candikuning), bahwa sebelumnya ia merasa tidak yakin bisa mencapai graduasi mandiri. Namun setelah didampingi dan diarahkan oleh Bapak Heri (Pendamping PKH Desa Candikuning saat ini), keyakinan dan kepercayaan dirinya muncul hingga bersedia mengajukan graduasi sejahtera mandiri, seperti disampaikan berikut ini:

“Dulu belum yakin bisa graduasi mandiri, tapi semakin yakin sejak didampingi Pak Heri. Diarahkanlah, diarahkan untuk mandiri.”

Di Desa Sumerta Kaja seperti telah disebutkan sebelumnya, KPM PKH cenderung mengajukan graduasi sejahtera mandiri karena mengikuti arahan dari pendamping dibandingkan mengajukan diri terlebih dahulu karena adanya stigma dalam masyarakat. Pendamping PKH Desa Sumerta Kaja pada saat melakukan sosialisasi selalu menekankan bahwa bantuan PKH tidak bersifat permanen. Beliau memberi edukasi bahwa dalam kurun waktu maksimal empat hingga lima tahun jika KPM sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri, maka harus siap untuk graduasi. Faktor pendorong lainnya adalah rasa percaya KPM akan kinerja pendamping, bahwa pendamping akan memprioritaskan dan mencari warga lain yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk diusulkan sebagai penerima manfaat PKH selanjutnya, seperti disampaikan oleh Ibu IS (KPM PKH Desa Sumerta Kaja) berikut ini:

“Ya pasti kan (yakin PKH membantu meningkatkan kesejahteraan). Baru-baru dapat (bantuan) itu, namanya jualan seperti saya pakai rombongan itu ya gak pasti, kadang-kadang pendapatan kalau udah kena hujan, ada sisa kadang-kadang tipis sekali. Dengan dapatnya bantuan itu, kerasa banget adanya



pertolongan. Saya setuju banget, program itu (PKH) setuju banget, bagi rakyat kecil terasa banget. Semoga kedepannya seperti Bapak Asa (pendamping) tidak capek-capek nyari orang yang betul-betul membutuhkan. Bapaknya kalau saya pikir betul-betul nyari orang yang membutuhkan, gak salah sasaran.”

3. Jaringan

Dalam suatu jaringan terjalin ikatan yang mendorong seseorang untuk saling membantu, saling menghargai, serta sebagai tempat mengalirnya informasi lebih cepat (Ma dan Kaplanidou 2021). Jaringan sosial yang terbentuk dalam kelompok pendampingan PKH memberikan pengaruh positif dalam kesuksesan pelaksanaan PKH. Berdasarkan hasil penelitian terhadap KPM dan pendamping, bahwa pertemuan kelompok PKH dilaksanakan secara rutin kurang lebih satu bulan sekali, kecuali selama masa pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas berkumpul masyarakat. Tidak hanya dalam pertemuan formal, menurut para KPM, pendamping sangat aktif dan responsif dalam memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan PKH.

Menurut para KPM, informasi-informasi yang diberikan pada saat pertemuan kelompok antara lain tentang pendidikan anak, informasi penyaluran bantuan sosial, cara menuju keluarga sejahtera, dan informasi mengenai graduasi mandiri. Pada kesempatan yang sama, KPM menyebutkan bahwa pendamping sangat responsif menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kendala yang dialami oleh KPM. Keberadaan jaringan dalam kelompok pendampingan PKH tidak hanya berfungsi dalam memberikan informasi, namun membantu memberikan solusi dan menghadapi kendala-kendala atau permasalahan terkait pelaksanaan PKH. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Usman (2018) bahwa jejaring sosial berperan sangat signifikan dalam mendorong penyebaran informasi yang perlu dipahami tentang berbagai masalah yang dihadapi serta mendiskusikan alternatif-alternatif yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Keberhasilan KPM dalam mencapai graduasi mandiri tidak terlepas dari kewirausahaan yang digelutinya. Di Desa Sumerta Kaja, mayoritas KPM bermata pencaharian sebagai pedagang. Salah satu contoh adalah usaha dagang yang dijalankan salah satu KPM yang awalnya berjualan dengan gerobak keliling, kini sudah memiliki lokasi berjualan tetap di depan sebuah ruko. Hal ini dapat terwujud



di samping karena peningkatan ekonomi, tentu karena adanya relasi-relasi dan aliran informasi yang memberikan peluang untuk tempat usaha tetap yang kini dijalankannya. Sedangkan di Desa Candikuning dengan potensi lahan pertaniannya, 90 persen masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Untuk KPM PKH graduasi di Desa Candikuning, di samping menjadi petani, mereka juga sudah mampu mengembangkan usahanya sebagai tengkulak sayur-mayur dengan jaringan yang cukup luas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu WK (KPM PKH Desa Candikuning) yang telah sukses menjadi tengkulak hingga ke Pasar Cokroaminoto, Kota Denpasar. Ia menyatakan bahwa usahanya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dengan mitra usaha dan rekan kerja:

“Usaha mulai stabil, menjadi tengkulak penjual sayur mayur ke pasar Cokro di Denpasar sejak tahun 2018. Melakukan pembelian di petani dan langsung menjual ke pasar, dan saya memiliki mitra dan rekan kerja yang sangat mendukung dan bisa bekerja sama dengan baik.”

Di samping itu, KPM merasa lebih terbantu dengan adanya pinjaman KUR dari BRI. Keberhasilan mereka memperoleh pinjaman KUR tentunya karena adanya arus informasi dalam jejaring di Desa mengenai KUR serta dukungan dari Aparatur Pemerintah Desa yang turut memberikan rekomendasi.

Modal sosial berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui partisipasi dalam organisasi sosial yang tumbuh melalui inisiatif dan kesadaran masyarakat tanpa intervensi pemerintah (Anto dkk. 2022). Peran jaringan dalam organisasi sosial ini juga terlihat pada suatu perkumpulan yang diikuti oleh KPM. Seperti salah satu KPM di Desa Sumerta Kaja yang aktif dalam kelompok pengajian di mana secara rutin mengumpulkan iuran dana kas yang disalurkan untuk warga yang tidak mampu atau terkena musibah seperti memberikan bantuan ke anak yatim dan korban bencana alam. Keikutsertaan dalam kelompok tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka sudah lebih mampu karena bisa turut menyisihkan dana untuk membantu warga lain yang membutuhkan, sehingga kesadaran dan kerelaan untuk keluar dari kepesertaan PKH semakin tinggi.

Pemaparan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa modal sosial berkontribusi dalam mewujudkan graduasi sejahtera mandiri PKH. Berdasarkan wawancara mendalam



kepada para KPM, penulis berkesimpulan bahwa kepercayaan menjadi unsur modal sosial yang paling kuat dan mempengaruhi munculnya peran dari unsur-unsur modal sosial lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Putnam, bahwa kepercayaan merupakan faktor kunci dalam penciptaan modal sosial (Matthews dan Besemer 2015). Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang terbentuk antara KPM dengan pendampingnya. Adanya kepercayaan yang kuat menyebabkan KPM cenderung mengikuti arahan dari pendamping. Peluang ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh pendamping untuk menguatkan peran unsur-unsur dalam modal sosial lainnya seperti nilai dan norma. Melalui proses komunikasi, edukasi, dan motivasi, pendamping senantiasa mengingatkan pentingnya nilai-nilai sosial, agama, dan norma hukum yang kemudian mampu mengubah pola pikir para KPM. Oleh sebab itu, pendamping PKH merupakan aktor kunci yang sangat berperan dalam keberhasilan program khususnya dalam mewujudkan graduasi sejahtera mandiri PKH.

Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Graduasi Sejahtera Mandiri PKH

Berdasarkan hasil penelitian terhadap KPM PKH yang masih menjadi peserta aktif, Pendamping PKH, dan Kepala Kewilayahan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri. Kendala-kendala tersebut dapat dijabarkan ke dalam dua bagian yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam diri KPM, sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari lingkungan luar KPM, termasuk berkenaan dengan sumber daya manusia PKH serta kebijakan pemerintah.

1. Kendala Internal

- a. Usaha yang dijalankan oleh KPM sulit berkembang, khususnya akibat Pandemi Covid-19. Hal ini terutama terjadi di wilayah perkotaan di mana saat dan pasca pandemi, banyak masyarakat yang di PHK dan beralih mata pencaharian sebagai pedagang. Seperti disampaikan oleh KPM yang masih aktif sebagai peserta di Desa Sumerta Kaja, pendapatan mereka jauh menurun ketika pandemi dan pasca pandemi layaknya memulai usaha dari nol, karena semakin banyak persaingan.



- b. Banyak KPM yang masih lemah dalam manajemen keuangan keluarga dan kurang mampu memanfaatkan keterampilan yang menjadi potensinya untuk lebih dikembangkan sebagai sumber pendapatan lainnya.
 - c. Kurangnya kesadaran diri, atau kecenderungan masyarakat untuk memiskinkan diri.
2. Kendala Eksternal
- a. Adanya bencana baik Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.
 - b. Permasalahan pada SDM PKH khususnya para pendamping sosial. Tidak semua pendamping memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga belum mampu memberikan edukasi dan motivasi yang bisa mengubah pola pikir KPM.
 - c. Belum adanya pelatihan khusus mengenai teknik menggraduasi bagi para pendamping, mengingat graduasi merupakan hal penting yang menjadi tujuan besar dari PKH.
 - d. Kelemahan dari program-program pemberdayaan yang bersifat anti klimaks, kurang sistematis dan tidak berkelanjutan.

Strategi Kebijakan Untuk Meningkatkan Jumlah Graduasi Sejahtera Mandiri PKH

Dalam perumusan strategi kebijakan diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Perumusan strategi kebijakan dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang organisasi serta meminimalkan kelemahan dan ancaman agar mencapai strategi yang efektif (Rahman dan Rahmah 2018). Langkah awal dalam merumuskan strategi kebijakan graduasi sejahtera mandiri PKH adalah dengan merumuskan faktor-faktor internal yang merupakan suatu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Faktor internal diperoleh dari kondisi internal pelaksana dan sasaran kebijakan PKH yakni pendamping dan KPM PKH. Selanjutnya adalah merumuskan faktor-faktor eksternal yang berasal dari



luar diri pendamping dan KPM meliputi kondisi lingkungan alam, kondisi perekonomian nasional, serta peran pemerintah dan stakeholders terkait.

Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka dapat disusun strategi kebijakan dalam meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri PKH sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan rutin bagi pendamping PKH se-Bali minimal enam bulan sekali. Pertemuan dirancang tidak hanya untuk membahas perihal pemutakhiran data dan penyaluran bantuan, namun sebagai wadah berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman terkait pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menggraduasi.
2. Merekomendasikan kepada Kementerian Sosial RI untuk melaksanakan Bimbingan Teknis tentang teknik menggraduasi bagi para pendamping PKH.
3. Merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan sosial yang sistematis dan berkelanjutan baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah.
4. Berkoordinasi dengan instansi dan stakeholders terkait untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan ataupun pelatihan tenaga kerja, serta koordinasi perihal akses permodalan bagi KPM.
5. Melanjutkan program komplementer berupa BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan lain sebagainya untuk mendukung stabilitas ekonomi KPM khususnya pasca pandemi.

Kesimpulan

Modal sosial dengan tiga variabel yakni nilai/ norma, kepercayaan, dan jaringan berkontribusi sebagai faktor pendorong dalam graduasi sejahtera mandiri PKH. Nilai/ norma yang dipegang teguh oleh KPM meliputi nilai sosial, nilai moral, nilai agama, serta kepatuhan memiliki keyakinan bahwa PKH dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kepercayaan yang lebih tinggi terbentuk antara KPM dengan pendampingnya. Peran pendamping terhadap norma hukum dalam Undang-Undang yang berlaku. Penerima manfaat menjadi faktor kunci dalam pencapaian graduasi karena KPM cenderung selalu mengikuti informasi dan arahan dari pendamping. Selanjutnya, jaringan yang terjalin dalam kelompok pendampingan menjadi wadah untuk menyalurkan informasi-informasi



positif, serta melakukan pendekatan-pendekatan yang mampu menggiring pola pikir KPM ke arah yang lebih baik. Di samping itu, jaringan usaha KPM dengan mitra usahanya berdampak tidak langsung pada graduasi, di mana keberhasilan usaha yang dijalankan oleh KPM berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan mendorong KPM untuk mengajukan graduasi sejahtera mandiri.

Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi KPM yang belum mampu mencapai graduasi sejahtera mandiri antara lain: kewirausahaan yang dijalankan oleh KPM sulit berkembang khususnya akibat dampak Pandemi Covid-19, lemahnya manajemen keuangan keluarga, kurangnya kesadaran diri dimana masih ada KPM yang cenderung memiskinkan diri, adanya bencana baik Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, lemahnya kemampuan komunikasi dan edukasi pendamping, belum adanya pelatihan khusus mengenai teknik menggraduasi bagi pendamping, serta program-program pemberdayaan yang bersifat anti klimaks, kurang sistematis dan tidak berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Desa dan Pendamping PKH, tidak hanya perihal pemutakhiran data dan penyaluran bantuan, namun pentingnya membahas teknik graduasi sejahtera mandiri agar tujuan dari PKH dapat tercapai. Lebih lanjut, alternatif-alternatif strategi kebijakan yang telah disusun dalam penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah graduasi sejahtera mandiri PKH.

Penelitian ini hanya berfokus menganalisis faktor pendorong graduasi sejahtera mandiri PKH dengan pendekatan modal sosial dan hanya mengambil sampel di dua Desa di Provinsi Bali yang kemungkinan belum cukup untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya. Hasil penelitian di dua desa ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh nilai moral (rasa malu) pada penelitian ini khususnya berdasarkan hasil temuan terhadap KPM di Desa Sumerta Kaja. Pada penelitian terdahulu, status sosial ekonomi dan kesadaran diri (rasa malu) menjadi faktor paling berpengaruh dalam graduasi. Sedangkan temuan di Desa Sumerta Kaja KPM justru merasa malu jika mengajukan graduasi atas inisiatif sendiri karena adanya stigma “sombong” di lingkungannya. Dengan melihat karakteristik dan budaya masyarakat yang berbeda, penelitian selanjutnya dapat



diperluas dengan menganalisis faktor pendorong melalui teori maupun pendekatan lain yang relevan serta menambah sampel lokasi di desa-desa lainnya dengan karakteristik masyarakat yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Anto, Rola Pola, La Ode Sahili, Sitti Rahmatyah, Gunawan, dan Risman Togala. 2022. "Identifikasi Potensi Modal Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Konawe Kepulauan." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(10):3503–12. doi: 10.47492/jip.v2i10.1356.
- Atmoko, T. P. H. 2014. "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman." *Jurnal Media Wisata* 12(2):146–54. doi: <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2022. *Profil Kemiskinan Bali September 2021*.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital." in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Budiarta, Kustoro, Ahmad Hidayat, dan Riza Indriani. 2021. "Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Markisa Di Sumatera Utara." *Jurnal Niagawan* 10(1):92–101. doi: 10.24114/niaga.v10i1.23482.
- Cislaghi, Beniamino, dan Lori Heise. 2018. "Four Avenues of Normative Influence: A Research Agenda For Health Promotion In Low And Mid-Income Countries." *Health Psychology* 37(6):562–73. doi: <https://doi.org/10.1037/hea0000618>.
- Coleman, James. 1999. *Social Capital in The Creation of Human Capital*. Cambridge: Harvard University Press.
- Damsar, dan Indrayani. 2019. *Pengantar Sosiologi Kapital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Elwijaya, Fadiyah, Neviyarni, dan Irdamurni. 2021. "Sistem, Nilai, Dan Norma Dalam Pendidikan Dasar: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(1):1840–45.
- Fahmi, Mohamad, Nur Afni Panjaitan, Ibnu Habibie, Adiatma Y. M. Siregar, Gilang Amarullah, Rahma, dan Deni K. Sunjaya. 2019. "Does Your Neighborhood Protect You From Being Depressed? A Study on Social Trust And Depression in Indonesia." *BMC Public Health* 19(1):1–8. doi: 10.1186/s12889-019-7657-5.
- Fathy, Rusydan. 2019. "Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6(1):1–17. doi: 10.22146/jps.v6i1.47463.



- Frimayanti, Ade Imelda. 2017. "Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 8(2):227-47. doi: <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128>.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press .
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran* . Yogyakarta: Qalam.
- Haridison, Anyualatha. 2021. "Modal Sosial Dalam Pembangunan." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 2(2):1-9. doi: <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.363>.
- Kementerian Keuangan RI. 2021. *Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 Mampu Menjaga Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan*.
- Kementerian Sosial RI. 2018. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan."
- Kementerian Sosial RI. 2020. "Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahun 2020."
- Kharisma, Bayu, Sutyastie Soemitro Remi, Adhitya Wardhana, dan Deni Minarso. 2020. "Modal Sosial Dan Kemiskinan Di Jawa Barat." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 23(Oktober):317-38. doi: [10.24914/jeb.v23i2.3303](https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3303).
- Khoiriyah, Nur, dan Kunarti. 2019. "Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Pati." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam: KOMUNITAS* 10(2):143-56. doi: <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1216>.
- Liu, Mingyue, Xiaolong Feng, Sangui Wang, dan Huanguang Qiu. 2020. "China's Poverty Alleviation Over The Last 40 Years: Successes and Challenges." *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics* 64(1):209-28. doi: [10.1111/1467-8489.12353](https://doi.org/10.1111/1467-8489.12353).
- Ma, Shang Chun, dan Kyriaki Kaplanidou. 2021. "Social Capital and Running: A Network Social Capital Perspective." *Sustainability (Switzerland)* 13(22). doi: [10.3390/su132212398](https://doi.org/10.3390/su132212398).
- Matthews, Peter, dan Kirsten Besemer. 2015. "Social Networks, Social Capital and Poverty: Panacea or Placebo?" *Journal of Poverty and Social Justice* 23(3):189-201. doi: [10.1332/175982715X14448122286274](https://doi.org/10.1332/175982715X14448122286274).
- Namini, Reza S., Mirella Loda, dan Abolfazl Meshkini. 2021. "SWOT Analysis and Developing Strategies for the Realisation of Urban Livability in Tehran." *International Journal of Urban Sustainable Development* 13(1):117-29. doi: [10.1080/19463138.2020.1827412](https://doi.org/10.1080/19463138.2020.1827412).



- Nursini, Nursini. 2020. "Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Poverty Reduction: Empirical Evidence From Indonesia." *Development Studies Research* 7(1):153–66. doi: 10.1080/21665095.2020.1823238.
- Oktavia Sari, Ainun, Rahayu Sulistyowati, dan Ita Prihantika. 2020. "Dampak Sosial Ekonomi Pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Exit Mandiri Dalam Perspektif The Most Significant Change Technique." *Jurnal Administrativa* 2(3):373–82. doi: <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i3.51>.
- Pemerintah RI. 2020. "Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional."
- Poluakan, Marcelino Vincentius, Santoso Tri Raharjo, dan Nunung Nurwati. 2020. "Strengths-Perspective Sebagai Penguatan Dalam Pengembangan Kebijakan Sosial Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Sosio Informa* 6(1):63–75. doi: 10.33007/inf.v6i1.1775.
- Putnam, Robert. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rahman, Jauhar Fadhlur, dan Devi Maulida Rahmah. 2018. "Identification of Business Processes and Strategies in Kadatuan Koffie Using SWOT Analysis." *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen Agroindustri* 7(3):161–69. doi: 10.21776/ub.industria.2018.007.03.4.
- Riztiana, Lia, dan Pambudi Handoyo. 2021. "Rasionalitas Graduasi Mandiri Sebagai Penerima PKH Di Desa Babadan Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Paradigma* 10(1).
- Sumartani, Desak Made, AAA Trisna Dewi, Ni Putu Santika Dewi, Ni Putu Natalya, Yohanes K. Herdyanto, David Hizkia Tobing, and AAS Suari Dewi. 2016. "Dinamika Rasa Malu Pada Remaja Pubertas." *Inquiry Jurnal Ilmiah Psikologi* 7(2):50–61. doi: <https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i2.100>.
- Suriono, Zuhud. 2021. "Analisis SWOT Dalam Identifikasi Mutu Pendidikan." *ALACRITY: Journal Of Education* 1(3):94–103. doi: <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i3.50>.
- Tantoro, Swis. 2014. *Pembasmian Kemiskinan: Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Usman, Sunyoto. 2018. *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wang, Jia, dan Zhifeng Wang. 2020. "Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis of China's Prevention and Control Strategy for the Covid-19



Epidemic." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(7):1–17. doi: 10.3390/ijerph17072235.

Yamin, Sofyan, dan Teguh Dartanto. 2016. "Pengentasan Orang Miskin Di Indonesia: Peran Modal Sosial Yang Terlupakan." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 17(1):88–102. doi: 10.21002/jepi.v17i1.656.

Yanti, Dini Fajar, dan Isbandi Rukminto Adi. 2021. "Analisis Process Terhadap Strategi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Result-Based Management." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 9(2):146–63. doi: 10.15408/empati.v9i2.18133.